DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penlitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amrah Muslimin, Beberapa Azas-azas dan pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni Bandung , 2001.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, Jakarta , 2005.

H.A.W. Widjaja, Otonomi daerah dan daerah otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, Pemerintahan Daerah diIndonesia dilengkapi oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Purtaka Setia, Bandung , 2005.

Murti Jeddawi, Negara Hukum, Good Governance Dan Korupsi di daerAh, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Mustafa Lutfi, Meneropong Komisi Informasi Publik, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2014.

Raharjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Jakarta , Kata Hasta, 2005.

Sedarmayanti, Reformasi Adminitrasi Publik, Reformasi Publik, Reformasi Publik dan Kepemimpinan Masa Depan, Refika Aditama, 2010.

Siswanto Sumarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sirajuddi, Hukum Pelayanaan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, 2011.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

_____, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3 ,Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2010.

Sri Soemantri , Sistem – Sistem Pemerintah Negara – Negara Asean ,Transito , Bandung , 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahn Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

C. Sumber Lain

Http//www.ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-covid...diakses 3 Juli 2020.

Http//www.alodokter.com/virus-corona, diakses tanggal 3 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB , ditulis oleh dr. Merry Dame Cristy Pane , Virus Corona (Covid 19).

Http//www.sumbar.antaranews.com/berita/340826/padang-akan-tutup,diakses 3 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB, ditulis oleh antarasumbar/Ikhwan Wahyudi , Padang akan tutup beberapa akses jalan masuk kota.

Http//www.komisiinformasi.go.id/?portfolio=hak-atas-informasi-publik, diakses 7 Maret 2020 Pukul 11.30 WIB, ditulis oleh Komisi Informasi Pusat, Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi

Http//www.ppid.dephub.go.id/./Pentingnya_Keterbukaan_Informasi_Publik ketua diakses tanggal 7 maret 2020 Pukul 11.00 WIB, ditulis Oleh Gede Narayana, Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik.

Http//www.erpandsima.blogspot.com/2015/05/informasi-publik.html,pada tanggal 5 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB